



# STATE CAPTURE REPRESSIONS:

Dilegalisasi dalam Regulasi,  
Dieksekusi oleh Instansi

LAPORAN TAHUN 2022  
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM & HAM INDONESIA (PBHI)

# 2022

## Penyusun

Badan Pengurus Nasional PBHI

## Tim Editor

Julius Ibrani dan Gina Sabrina

## Disain dan Tata Letak

Tim Publikasi dan Kampanye PBHI

## Sekilas Tentang PBHI


Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang bersifat non-profit, didirikan pada 5 November 1996 oleh para pegiat HAM, seperti: Hendaradi, Luhut MP Pangaribuan, Rocky Gerung, Soendjati, Maria Pakpahan dan tokoh lainnya.


PBHI merupakan organisasi dengan basis anggota (individu pegiat bantuan hukum dan kemanusiaan) untuk tujuan pemajuan dan pembelaan hak asasi manusia baik melalui penanganan kasus, pendampingan dan pembelaan korban pelanggaran hak asasi manusia, pemberdayaan komunitas korban, penelitian dan pengembangan HAM maupun advokasi kebijakan nasional dan internasional.


PBHI bekerja bersama PBHI wilayah di 10 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan). Kongres VI PBHI diselenggarakan pada 5-7 November 2021 dengan mandat fokus kerja pada penguatan akar rumput (grass roots) melalui isu strategis: inisiasi dan perbaikan kebijakan HAM yang inklusif dan progresif, penguatan perlindungan pembela HAM dan pembela HAM perempuan, keadilan ekologis melalui perlindungan lingkungan hidup, perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penuntasan kejahatan ekosida serta reformasi supremasi dan kebebasan sipil.


Kongres PBHI VI juga memilih Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI yakni Julius Ibrani yang kemudian menunjuk Gina Sabrina sebagai Sekretaris dan Regina JBF Astuti sebagai bendahara. Dengan fokus penguatan kelembagaan berupa pengarusutamaan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan kelompok rentan dan disabilitas, serta akuntabilitas.

## Situs dan Kanal Media Sosial


 : [pbhi.or.id](http://pbhi.or.id)

 : [seknas@pbhi.or.id](mailto:seknas@pbhi.or.id)

 : [@pbhi\\_nasional](https://www.instagram.com/pbhi_nasional)

 : [@pbhi\\_nasional](https://twitter.com/pbhi_nasional)

 : PBHI Nasional

 : Jl. Hayam Wuruk No. 4 SX-TX, RT/RW 09/005, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120 - INDONESIA

# PBHI WILAYAH

## Sumatera Utara

Komplek The Prime Residence, Jl. Setia Budi, Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara

## Kalimantan Barat

Komplek Permata Paris No.A10, Jl. Parit H. Husin 11, Bansir Darat, Pontianak, Kalimantan Barat

## Jakarta

Jl. Tebet Barat VIII No.8, RT10/RW.3, Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

## Sulawesi Selatan

Ruko Topas raya B16, Panakkukang, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

## Sumatera Barat

Jl. Belanti Raya No.4, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

## Lampung

Jl. Pelanduk No.12, Sidodadi, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

## Yogyakarta

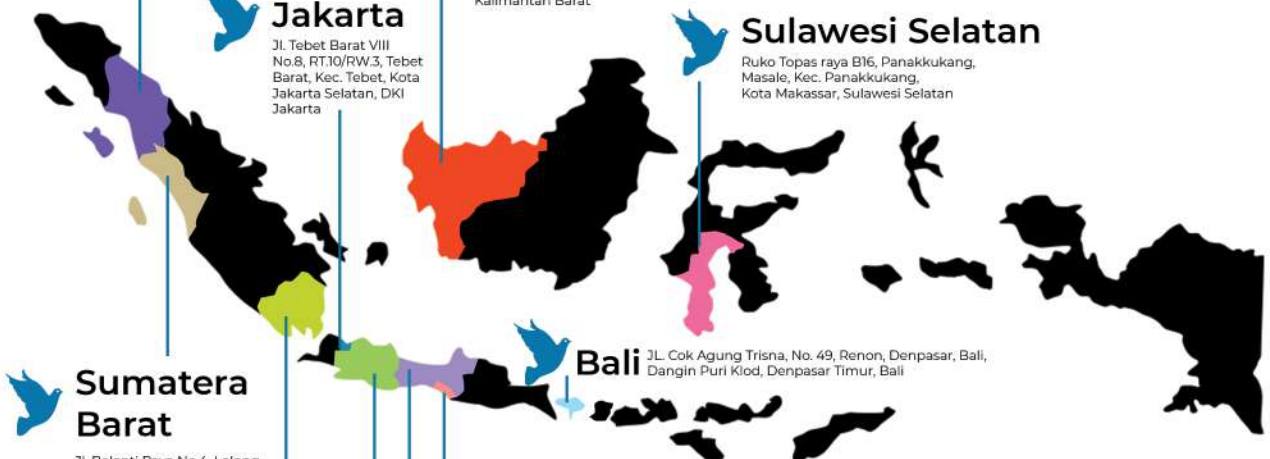
Jl. Manuk Beri, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

## Jawa Tengah

Jl Sedayu Kenanga II, Perum Sedayu Kenanga Regency No.4A, Genuk, Kota Semarang

## Jawa Barat

Jl. Pecah Kopi No.14, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Jawa Barat



# DAFTAR ISI

● Cover	i
● Peta PBHI Wilayah	ii
● Daftar Isi	iii
● Logo PBHI	1
● Refleksi Pengantar	2
● Tentang PBHI	3
● Bagaimana Kami Bekerja	4
● Jejaring Kerja PBHI	5
● Struktur Organisasi PBHI	6
● Struktur Badan Pengurus Nasional	7
● Isu Strategis PBHI 2022-2025	8
● Inisiasi dan Perbaikan Kebijakan HAM yang Inklusif dan Progresif	9
> Akses Keadilan dan Bantuan Hukum	9
> Reformasi Sistem Peradilan	9
> Pelanggaran HAM Masa Lalu	9
> Eradikasi Penyiksaan	9
> Penghapusan Hukuman Mati	9
> Penguatan Komisi Negara	9
> Pelindungan Data Pribadi	9
> Penguatan Hak Atas Kesehatan Post Pandemi	9
a. Pengendalian Tembakau	9
b. Penanganan TB Berbasis HAM	9
> Perbaikan Tata Kelola Narkotika	9
> Pengarusutamaan HAM di Papua	9
● Pelindungan Pembela HAM/pembela HAM Perempuan	10
> Kebebasan Pers	10
> Pengakuan Pembela HAM	10
> Pemulihan Pembela HAM	10
> Pendampingan	10
● Keadilan Ekologis melalui Pelestarian Lingkungan Hidup, Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Penuntasan Kejahatan Ekosida	11
> Kriminalisasi	11
> Alih Fungsi Lahan	11
> Paralegal	11
> Mekanisme Komplain	11
● Reformasi Supremasi dan Kebebasan Sipi	12
> Anti-Militerisme	12
> Reformasi Sektor Keamanan	12
> Penghapusan Defamasi	12
● Pemantauan Isu Khusus	13
● #PapuaKitaSemua	14
● Tren Kasus Permohonan Bantuan Hukum 2022	15
● Key Milestone	16
● Publikasi	17
● Liputan Khusus	18
● Inisiasi dan Perbaikan Kebijakan HAM yang Inklusif dan Progresif	19
● Mitra Pendukung	24
● Ringkasan Laporan Keuangan	25

# LOGO PBHI



# PBHI

Tema:

## **Konsolidasi Advokasi, Melawan Represi**

- ▶ Menggambarkan konsolidasi PBHI secara utuh antara nasional dan wilayah, karena kesamaan isu dan situasi pelanggaran HAM di berbagai level dan area geografis
- ▶ Menegaskan Advokasi PBHI yang independen, obyektif dan bebas nilai



# Refleksi Pengantar

“State Capture Repression: Dilegalisasi dalam Regulasi, Dieksekusi oleh Instansi”

Dua tahun pandemi (2020-2021) telah menguak secara tegas situasi buruk pemenuhan hak asasi manusia (“HAM”) oleh negara, yang didominasi oleh insiden pelanggaran berbagai aspek hak asasi. Sebut saja, minimnya akses kesehatan berupa perawatan dan pengobatan, serta program vaksin Covid-19 karena kebijakan koruptif dan diskriminatif, PHK massal terhadap buruh akibat kebijakan pembatasan mobilisasi (PPKM) tanpa solusi apalagi jaminan ekonomi, represi terhadap ekspresi HAM oleh publik dan pencari keadilan serta kelompok korban (Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, Berorganisasi, dan lainnya). Situasi buruk ini justru diperparah dengan tindakan represif aparat negara dan kriminalisasi melalui peradilan sesat serta militerisasi struktur sipil. Praktik represif aparat negara ini disusul dengan berbagai kebijakan yang juga melanggar hak asasi, misalnya pemaksaan aplikasi kesehatan namun dijual kepada pihak swasta, pengawasan pada akun media sosial pengkritik pemerintah, dan terakhir pembungkaman kepada kelompok aktivis HAM dan oposisi politik, di sisi lain pengrusakan lingkungan hidup melalui eksploitasi sumber daya alam dan proyek strategis nasional oleh oligarki semakin membabi buta. Sebuah titik nadir kondisi hak asasi, menguatnya represi dipadupadankan dengan ruang demokrasi (supremasi dan kebebasan sipil) yang kian menyempit. Sementara, bantuan hukum struktural sebagai sarana pembelaan justru stagnan, di level kebijakan maupun praktik layanan.

Dua tahun menuju pesta pora oligarki melalui Pemilu, yakni tahun 2022, ditandai dengan berubahnya pola pelanggaran hak asasi yang tadinya bersifat insidental dan terbatas hanya di beberapa sektor isu, justru “di-institusionalisasi” ke dalam 3 (tiga) level secara sistematis dan terstruktur dengan indikator kepentingan politik dan kapitalisasi modal pemilu. Pertama, melalui pembungkaman pegiat hak asasi melalui represi dan kriminalisasi, manipulasi partisipasi publik dalam proses legislasi, pembajakan hak dan ruang publik dalam proses demokrasi. Situasi ini hanya bisa dijawab dengan gerakan masyarakat sipil secara konsolidatif, tidak hanya organisasi (CSO) tetapi juga pelibatan kelompok korban dan lebih luas lagi akar rumput (grass roots). Ruang-ruang demokrasi dan hak asasi sekecil apapun harus direbut, karena tidak ada satupun hak asasi yang diberikan.

Situasi yang sama juga sedang dihadapi di berbagai belahan dunia, spesifik di Asia seperti Asia Selatan, Asia Tenggara Asia Tengah bahkan hingga Asia Timur yang jauh dari hingar-bingar.

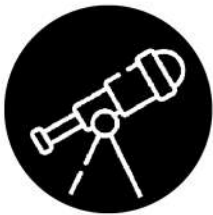
Oleh sebab itu, PBHI berkomitmen kuat untuk tetap berkontribusi kepada masyarakat akar rumput, dan hadir di berbagai level gerakan, demi perubahan situasi hak asasi manusia yang mengedepankan persamaan dan keadilan sosial, terbukanya ruang demokrasi yang menjamin supremasi dan kebebasan sipil.

Laporan Tahunan PBHI untuk 2022, bukanlah sekedar kata-kata, melainkan sebuah trigger mechanism atas perjuangan para pegiat hak asasi yang patut diapresiasi sekaligus menjadi pijakan langkah ke depan.



**Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI**  
Julius Ibrani

# TENTANG PBHI



## VISI

Terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.



## MISI

- ▶ Mempromosikan nilai-nilai universal hak-hak manusia;
- ▶ Membela para korban pelanggaran
- ▶ Mendidik anggota dan calon anggota sebagai pembela hak-hak manusia.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang bersifat non-profit yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, rentan, minoritas dan termarginalkan dalam kerangka advokasi pembangunan hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Fokus Kerja PBHI: pemajuan dan pembelaan hak asasi manusia baik melalui penanganan kasus, pendampingan dan pembelaan korban pelanggaran hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat/komunitas (Community Empowerment) kepada komunitas/masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia, penelitian dan pengembangan hak asasi manusia, serta advokasi kebijakan nasional dan internasional

Rekam jejak PBHI dalam pemajuan dan pembelaan hak asasi manusia cukup panjang, advokasi korban pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu seperti mendorong invasi militer di Timor Leste, penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998, dan lainnya. Dalam konteks Advokasi keadilan Iklim bersama Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia kerusakan Lingkungan, selain melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap Pembela HAM yang aktif melakukan advokasi di isu kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA seperti kriminalisasi Haris Azhar (Lokataru) dan Fatia Maulidiyanti (KontraS), persekusi dan kekerasan terhadap paralegal PBHI Wilayah pendamping korban penggusuran paksa proyek infrastruktur (TransJawa, Trans Sumatera, Kereta Cepat Bandung, Bandara Kulonprogo dan Kertajati, Waduk Jatigede, Reklamasi Jakarta-Pulau Pari dan lainnya), serta pendampingan korban perampasan tanah oleh mafia HGU Sawit seperti Petani Kopsa M, Mesuji-OKI, Wadas, dan lainnya, termasuk melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan kepada masyarakat korban agar memiliki kapasitas melakukan advokasi secara mandiri. Dalam konteks kebijakan, PBHI menginisiasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 1 Tahun 2018 dan revisinya menjadi No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal ("PermenkumHAM Paralegal") agar memberikan legitimasi formil dan administratif terhadap peran dan kontribusi paralegal dengan latar belakang kelompok masyarakat/komunitas korban. Inisiasi lainnya yakni Permenkumham No.4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang menjamin kualitas layanan bantuan hukum berbasis kebutuhan penerima dengan memperhatikan kekhususan dan kondisi kelompok rentan.



# BAGAIMANA KAMI BEKERJA

Dalam mendorong pemenuhan HAM oleh negara PBHI bekerja melalui pendokumentasian, penelitian dan pengembangan terkait isu HAM, peningkatan kapasitas kelembagaan, konsolidasi korban dan jejaring organisasi masyarakat sipil, advokasi kebijakan dan litigasi strategis serta publikasi dan kampanye luas.

Kontribusi dan intervensi PBHI dalam mendorong perubahan dilakukan dengan mengkonsolidasikan dan mendidik jejaring korban serta melakukan pembelaan untuk mendorong korban menjadi pembela HAM dan pintu terdekat dalam akses keadilan. Kerja-kerja tersebut dilakukan bersamaan dengan advokasi kebijakan yang menasar pada pemerintah serta kampanye untuk membangun kesadaran masyarakat

## Kontribusi dan Intervensi yang Dilakukan



**Dokumentasi dan Litbang**



**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**



**Konsolidasi Korban dan Jejaring CSO**



**Advokasi Kebijakan dan Litigasi Strategis**



**Publikasi dan Kampanye**



# Jejaring Kerja PBHI

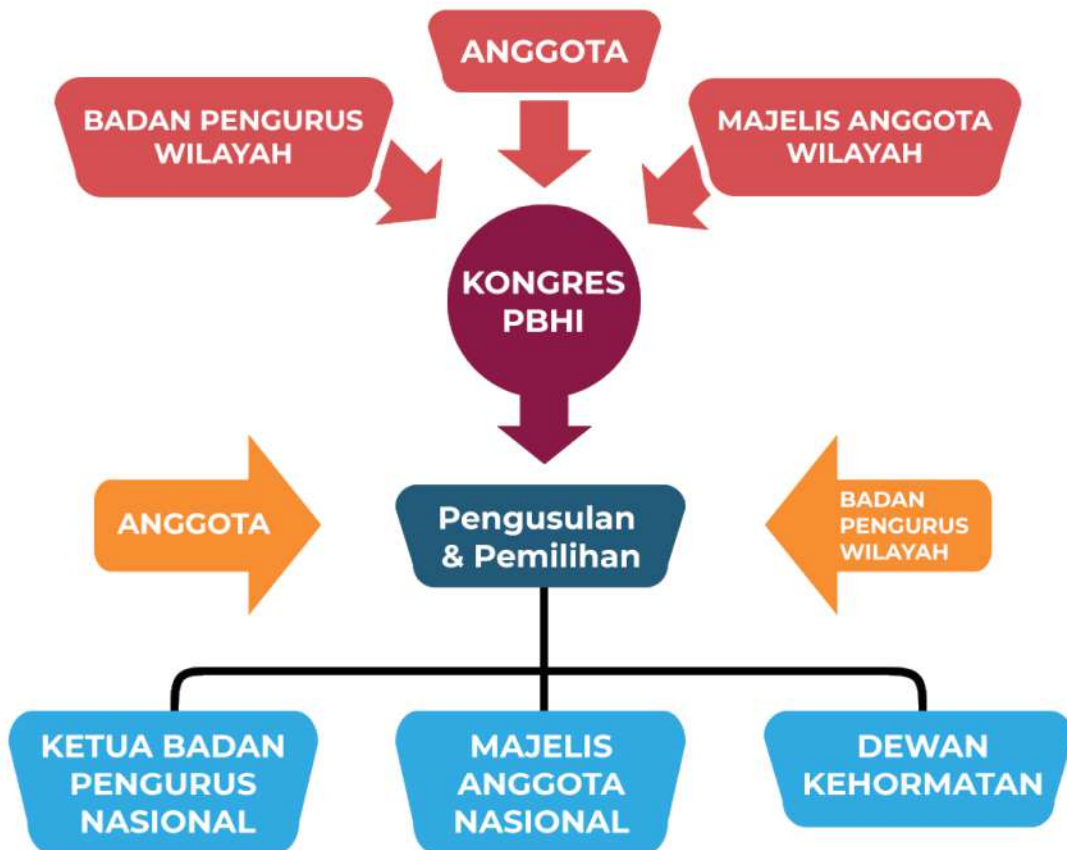
Kerja-kerja PBHI dalam advokasi, penelitian dan kampanye luas dilakukan dengan koordinasi dan ko-kreasi bersama komunitas akar rumput dan korban dengan melibatkan jejaring kelompok masyarakat sipil dan Komisi Negara yang fokus terhadap HAM.

Dalam hal inisiasi kebijakan PBHI langsung menginisiasi kepada lembaga negara terkait, seperti: Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan lainnya. Serta membangun sistem pemulihan HAM (human rights remedy) dengan lembaga peradilan.

PBHI juga aktif menginisiasi dan terlibat dalam jejaring kerja koalisi masyarakat sipil, antara lain: Koalisi Pemantau Peradilan untuk isu sistem peradilan pidana, reformasi sektor keamanan untuk anti militerisme dan supremasi sipil, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika untuk mendorong dekriminialisasi pengguna NAPZA dan pendekatan kesehatan, Koalisi Tolak Hukuman Mati dalam upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia, Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk pengawalan perubahan KUHP, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan untuk isu anti-militerisme melalui reformasi TNI dan kepolisian.



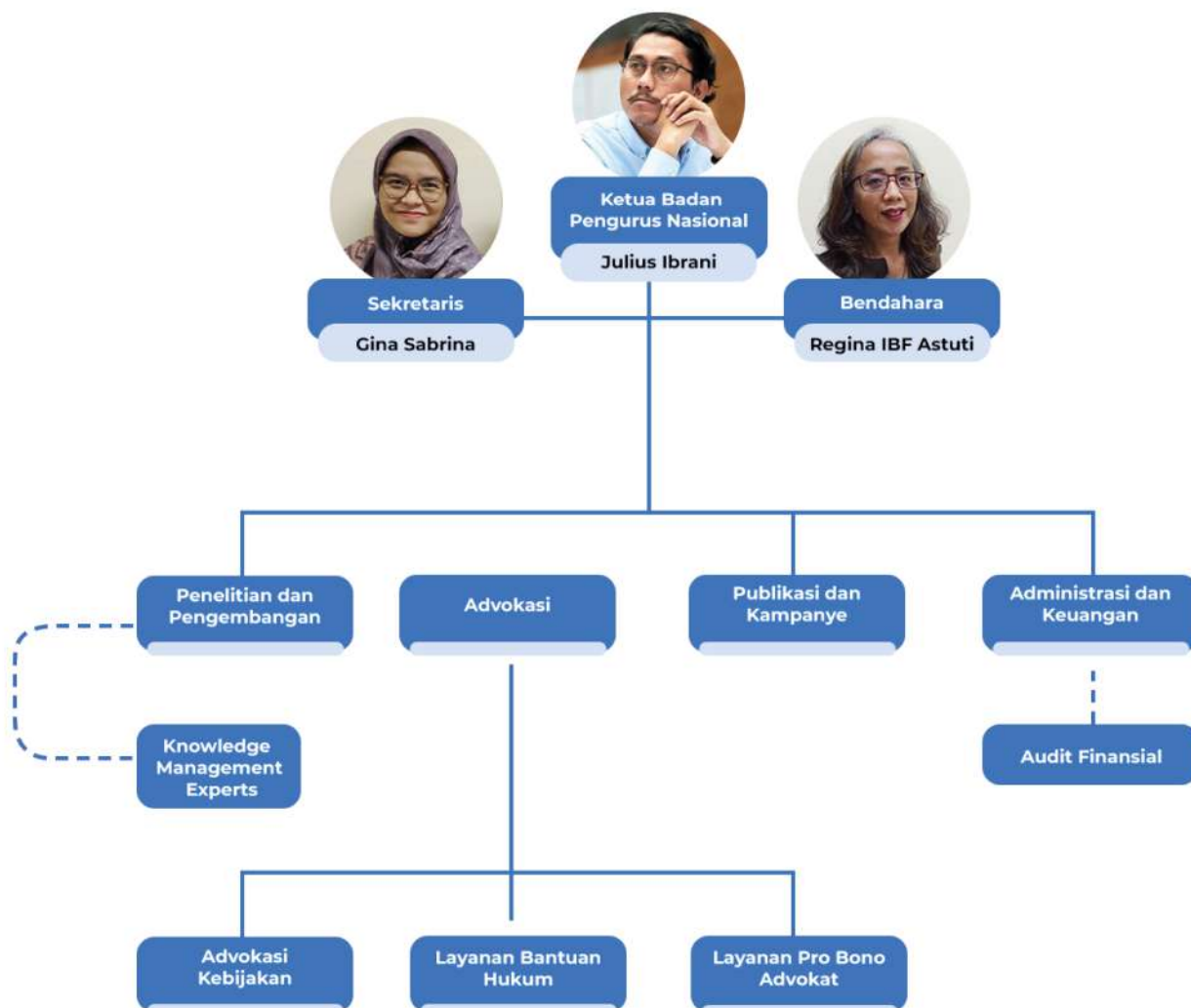
# STRUKTUR & MEKANISME KERJA





## STRUKTUR

# BADAN PENGURUS NASIONAL

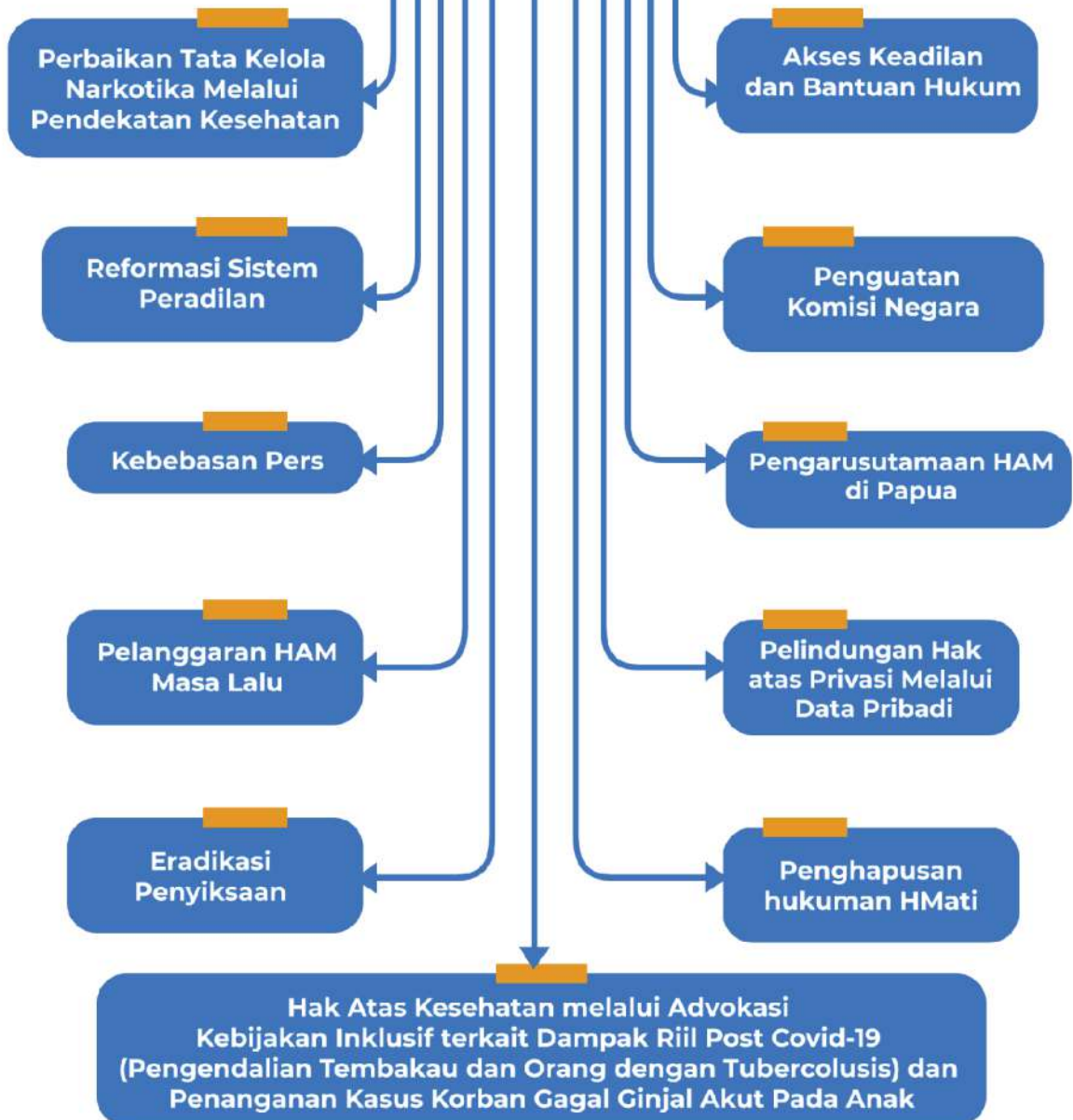


# ISU STRATEGIS PBHI 2022-2025

1. Inisiasi dan Perbaiki Kebijakan Hak Asasi Manusia yang Inklusif dan Progresif
2. Penguatan Perlindungan Pembela HAM dan Pembela HAM Perempuan;
3. Keadilan Ekologis melalui Pelestarian Lingkungan Hidup, Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Berkeadilan, dan Penuntasan Kejahatan Ekosida;
4. Reformasi Supremasi dan Kebebasan Sipil



## INISIASI DAN PERBAIKAN KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA YANG INKLUSIF DAN PROGRESIF



# PELINDUNGAN PEMBELA HAM /PEREMPUAN PEMBELA HAM

- **Pelindungan Jurnalis dan Jurnalis Perempuan**
- **Pengakuan Pembela HAM/Pembela HAM Perempuan dalam Mekanisme Komisi Negara**
- **Pemulihan terhadap Pembela HAM yang Mengalami Serangan**
- **Advokasi Pembela HAM dari Kriminalisasi dan Serangan Lainnya**
- **Pelindungan Paralegal Komunitas**



# KEADILAN EKOLOGIS MELALUI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, PERBAIKAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM, DAN PENUNTASAN KEJAHATAN EKOSIDA





## REFORMASI SUPREMASI DAN KEBEBASAN SIPIL



01

Pengarusutamaan  
Keamanan Manusia  
dan Demiliterisasi  
Ruang Sipil

Reformasi Sektor  
Keamanan di Kepolisian  
TNI dan Kementerian/  
Lembaga Negara Lainnya

02

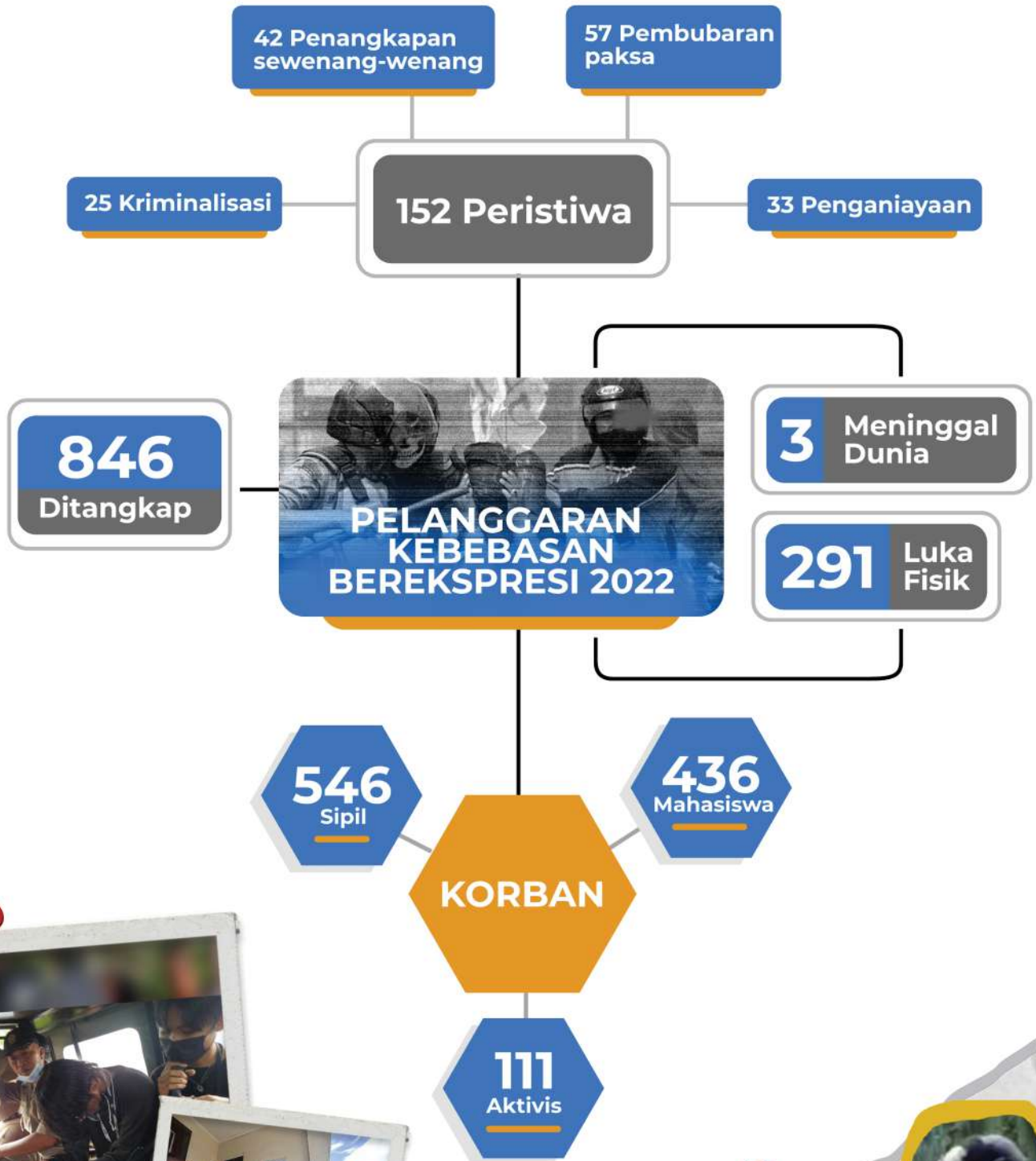


03

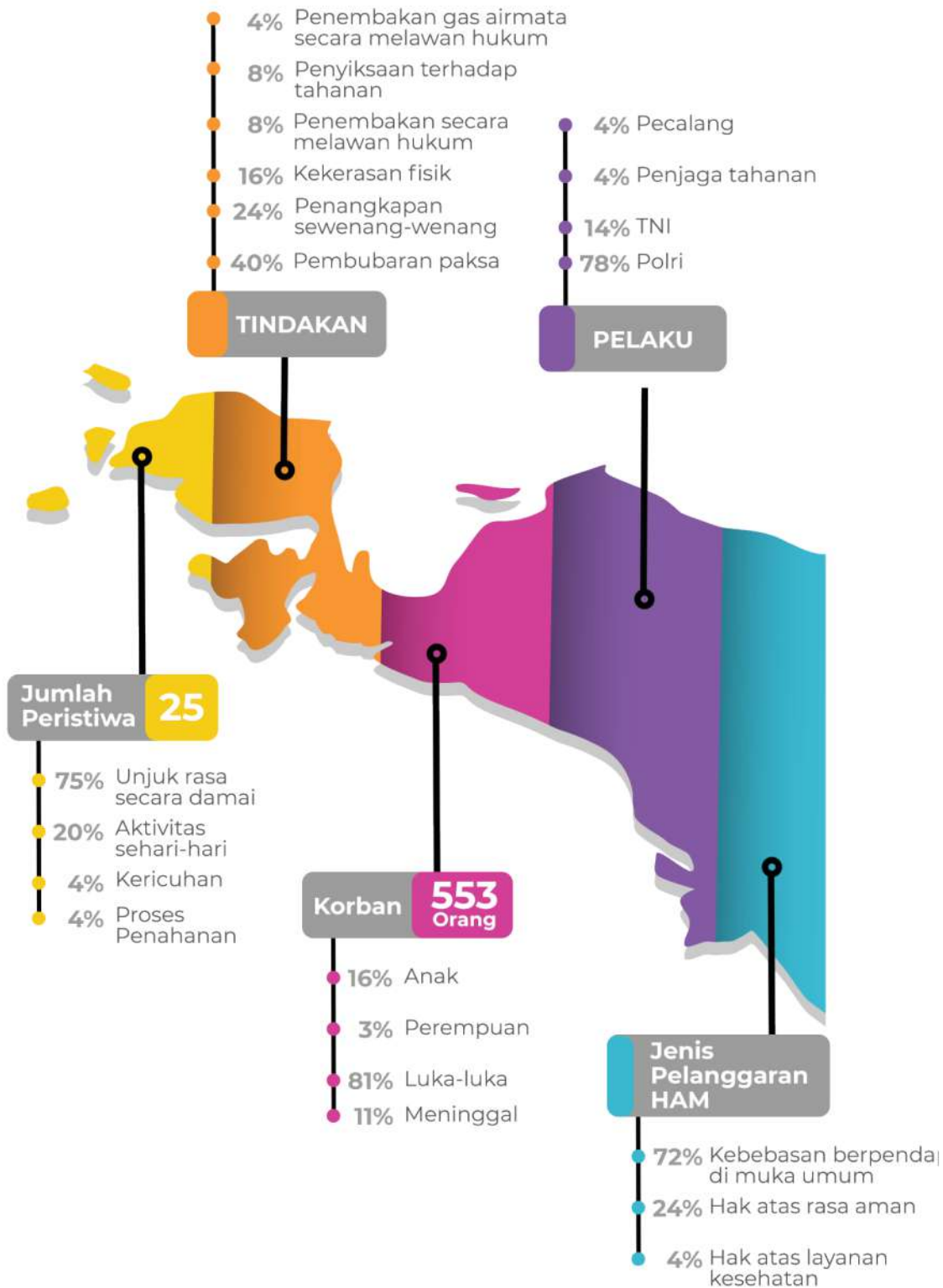
Pengarusutamaan  
Kebebasan Sipil



# PEMANTAUAN ISU KHUSUS



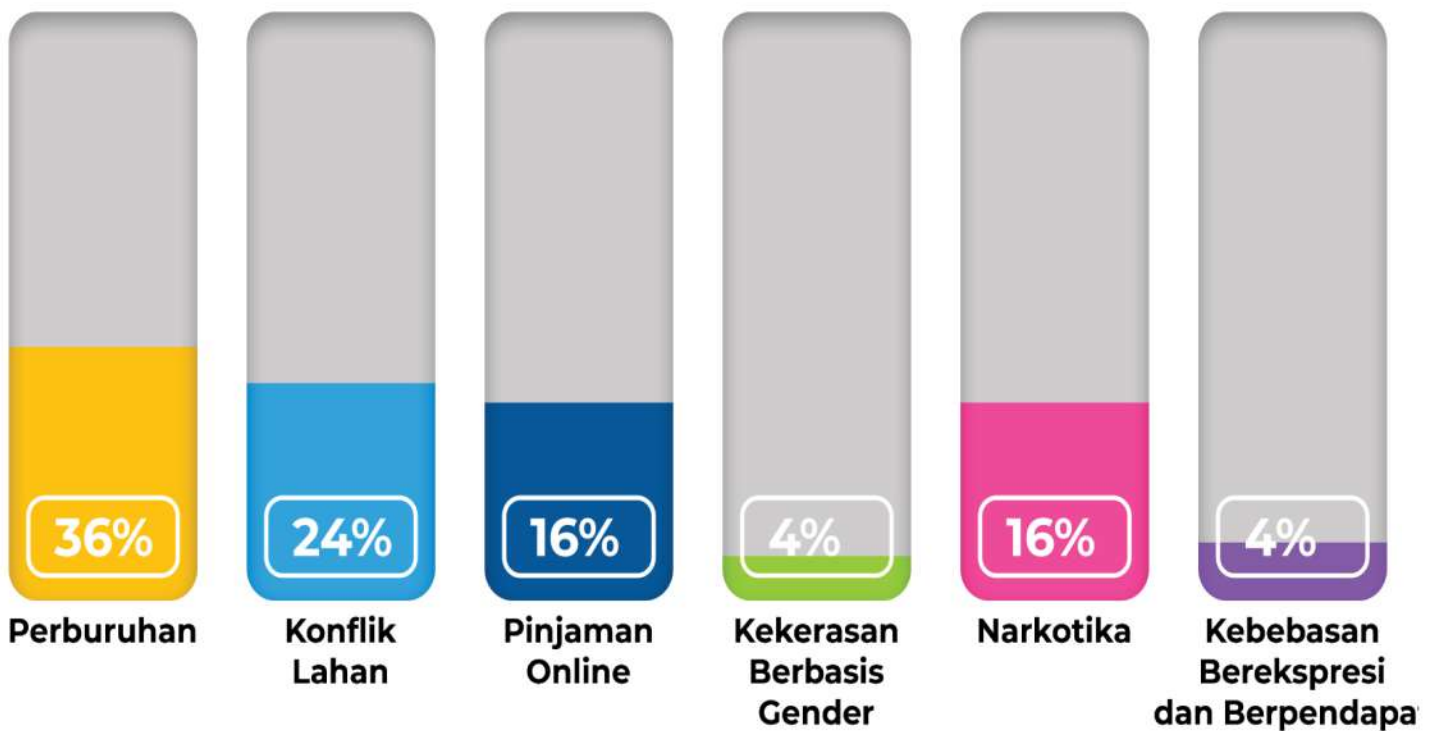
# #PapuaKitaSemua



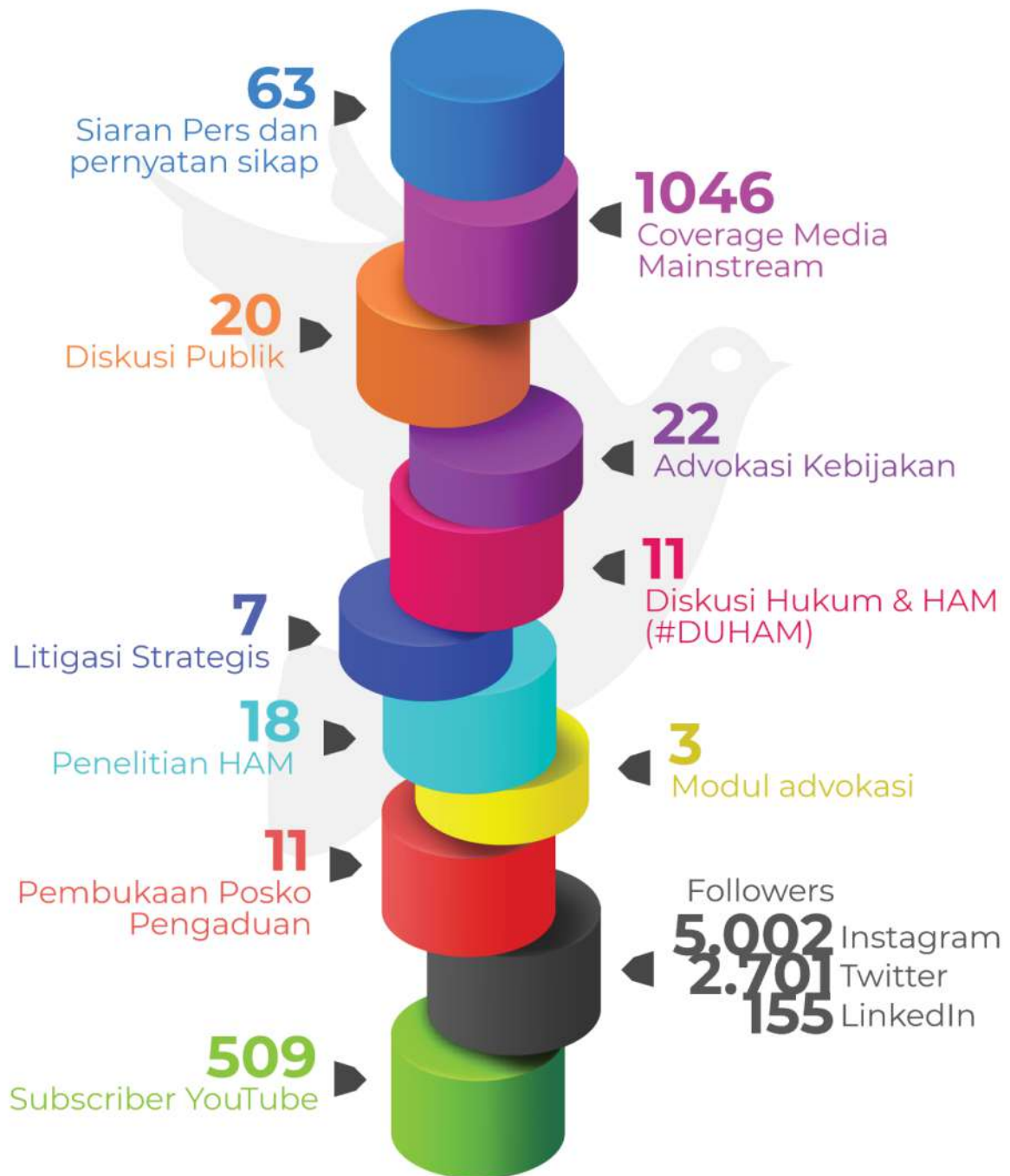
# Tren Kasus

Permohonan Bantuan Hukum

# 2022



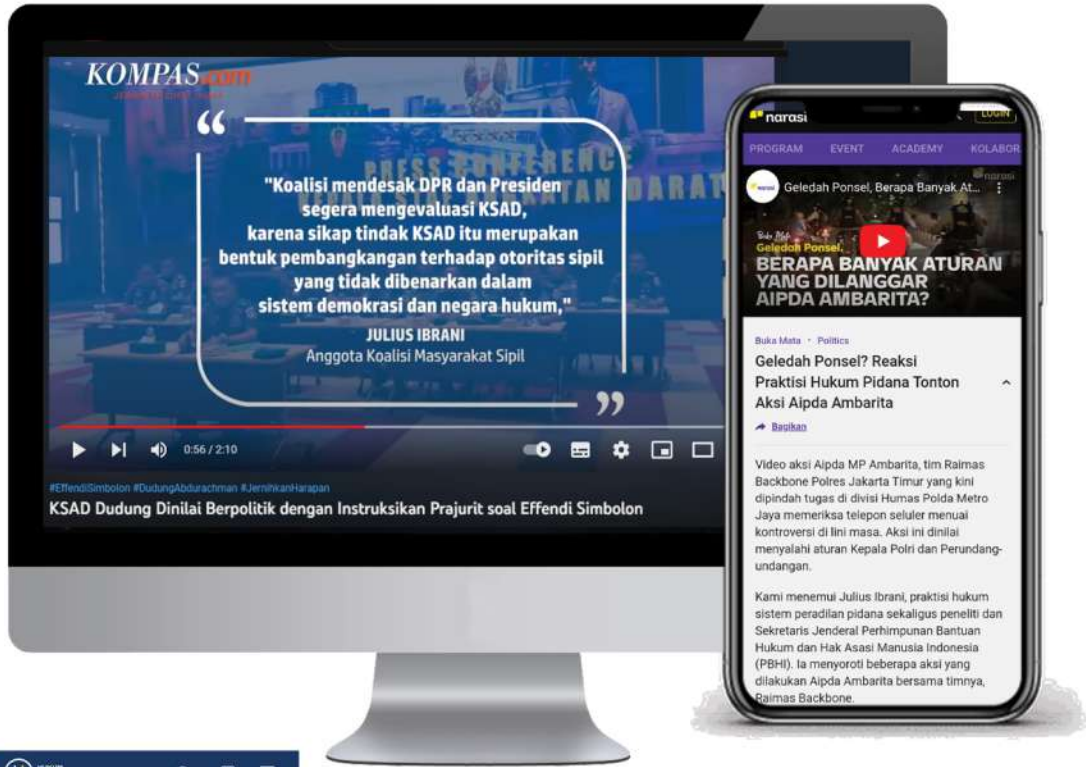
# KEY MILESTONES



# PUBLIKASI



# LIPUTAN KHUSUS



Terbaru > 5 Catatan PBHI untuk...

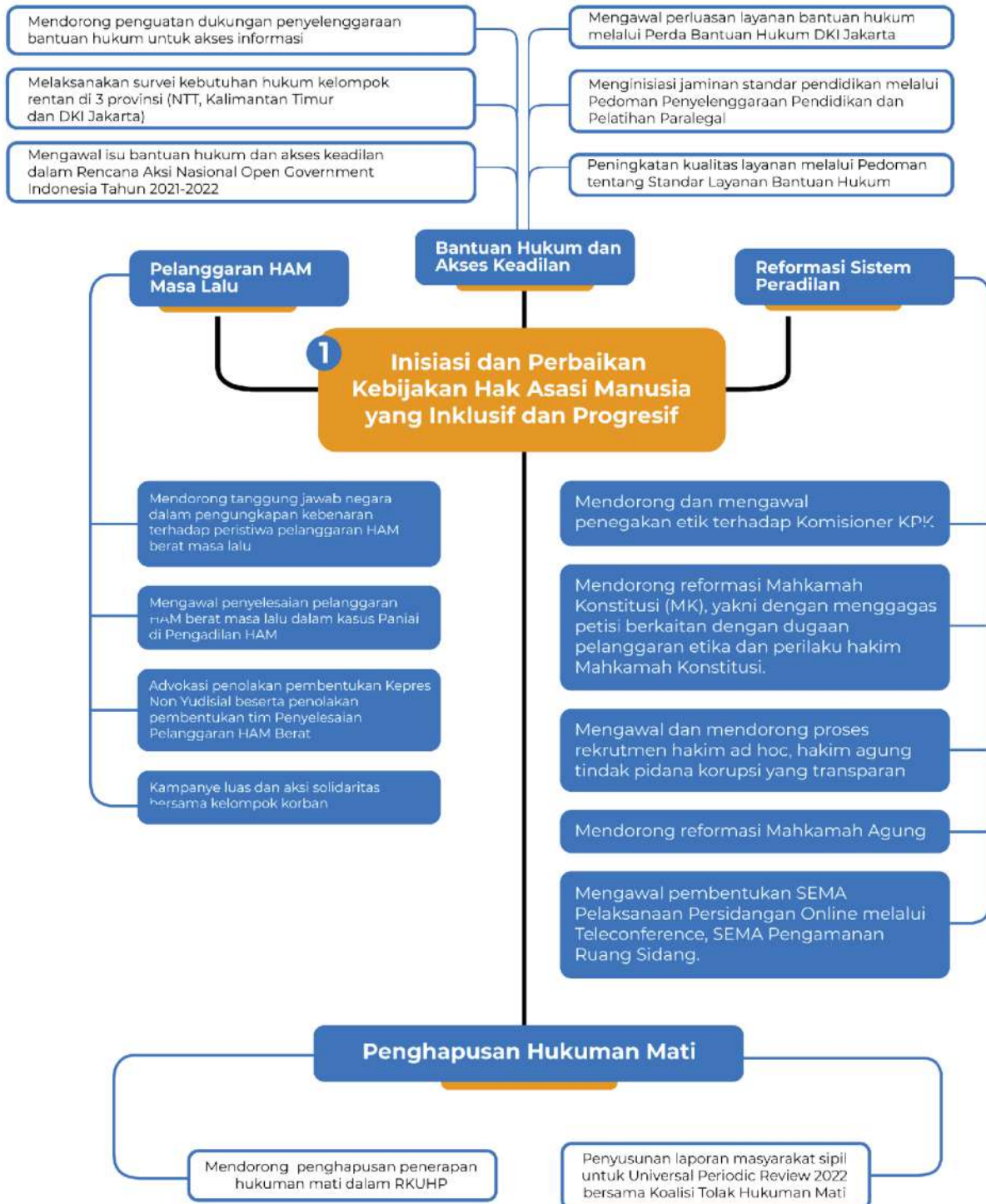
## 5 Catatan PBHI untuk Kasus gagal Ginjal Akut Pada Anak

Presiden Joko Widodo didesak melakukan mutasi atau memecat pejabat negara dari instansi yang terlibat dalam administrasi izin dan edar obat sirip mematin sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus menghindari konflik kepentingan dalam pemeriksaan.

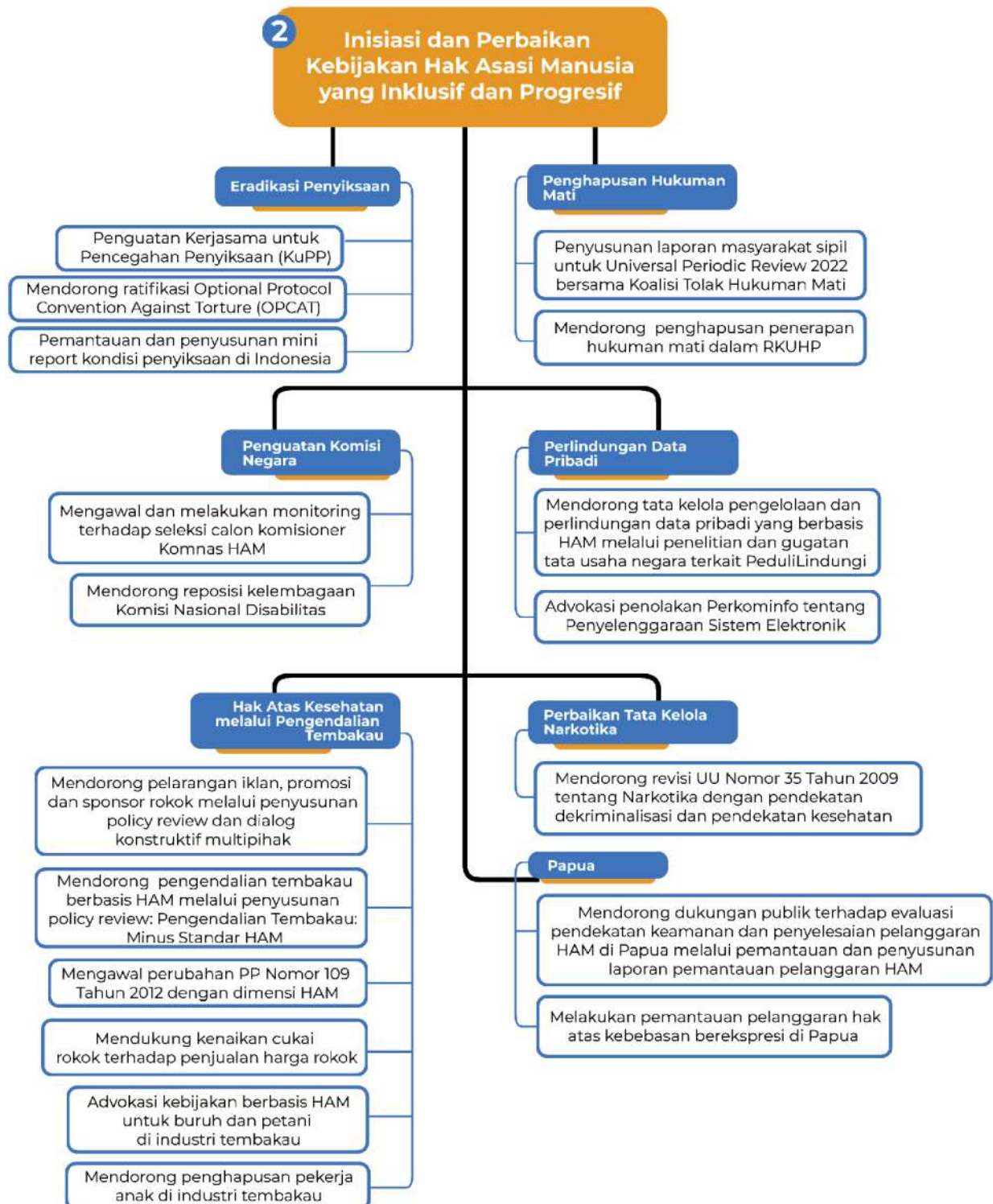
Oleh: Ady Thea DA Backan 3 Menit



# Inisiasi dan Perbaikan Kebijakan Hak Asasi Manusia yang Inklusif dan Progresif



# Inisiasi dan Perbaikan Kebijakan Hak Asasi Manusia yang Inklusif dan Progresif





## PERLINDUNGAN PEMBELA HAM/ PEREMPUAN PEMBELA HAM

### Kebebasan Pers

Mendorong kebebasan pers melalui penghapusan delik pers dalam RKUHP

### Pengakuan Pembela HAM

Mendorong pengakuan dan perlindungan pembela HAM melalui Peraturan Komnas HAM dan Standar Norma Pengaturan Pembela HAM

### Pemulihan Pembela HAM

Melakukan pemulihan terhadap pembela HAM yang menjadi korban serangan fisik, psikis dan digital

### Pendampingan

Pendampingan pembela HAM yang mengalami serangan, seperti: kriminalisasi, dan lainnya.



## KEADILAN EKOLOGIS, MELALUI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN PENUNTASAN KEJAHATAN EKOSIDA

### Kriminalisasi

Mendampingi korban kriminalisasi dalam konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam baik di pengadilan maupun luar pengadilan

### Alih Fungsi Lahan

Melaksanakan asesmen terkait konflik lingkungan dan sumber daya alam serta kebutuhan komunitas korban kerusakan lingkungan hidup

### Paralegal

Melakukan pembentukan kapasitas terhadap komunitas korban kerusakan lingkungan hidup

### Mekanisme Komplain

Litigasi strategis untuk mekanisme komplain

# Reformasi Supremasi dan Kebebasan Sipil

## Anti-Militerisme

- Menolak peran TNI dalam ranah Sipil yang membahayakan kebebasan berdemokrasi melalui gugatan tata usaha negara terkait pejabat daerah dan permohonan uji materiil UU PSDN

## Reformasi Sektor Keamanan

- Mendorong demiliterisasi melalui permohonan uji materiil UU PSDN

## Penghapusan Defamasi

- Mendorong dan mengawal penghapusan pasal-pasal defamasi baik dalam RKUHP maupun UU ITE

# Mitra Pendukung



UiO : **Norwegian Centre for Human Rights**  
University of Oslo



**The Asia Foundation**

